

# **KINERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN SEKTOR PAJAK BUMI BANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**Oleh: Hafidh Al Fajri.**

## **ABSTRACT**

This research was intended to describe work performance of monetary management and regional assets income office for increasing income on land and building taxes in rural as well as in urban area in Sukoharjo Regency . The second objective of this research was investigating factors supporting in realizing in creasing income on land and building taxes in rural as well as in urban area in Sukoharjo Regency. Qualitative research approach was used in this study. Interview, observation, and documentary study techniques were employed to collect the needed data. Respondents of this research were some employees of DPPKAD and some tax payers. Interactive analysis model consisting of three elements i.e. data reduction, data display, and verification and conclusion drawing was used to analyse the data. Research result indicated that: (1) Work performance of DPPKAD employees related to the increasing of PBB-P2 found to be high. It is indicated by the tax income was over the planned target; (2) There were some internal and external factors faced by the DPPKAD related to PBB-P2. Such internal factors included policy aspect, administrative system, inconsistency, and human resource. The external factors included: low attitude and conscieness of tax payers, and the adjustment of data with the reality of the field; (3) Some measures taken by the DPPKAD related to internal factors were: reward system applied for the tax collectors in sub-district and village level, improving the administrative system, recruitment of selected qualified employees, and upgrading for the DPPKAD employees. Overcoming the inhibating external factors, some measures were taken: extension for tax payer, reward for the tax payer, renewing the data, sympathetic operation, and direct observation to the field, and facilitating easeaness to pay tax by opening mini office in village level.

*Key word: Tax payer; work performance; Monetary Management and Regional Assets Income Office (DPPKAD); Land and Building Taxes in rural and urban areas (PBB-2P)*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini Pemerintah Daerah harus memusatkan perhatian dan mengupayakan untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Karena PAD merupakan salah satu cermin dan ukuran atas kemampuan keuangan daerah dalam rangka membeayai operasional pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berbagai upaya ditempuh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, diantaranya adalah dengan semakin memperbesar target dari retribusi dan pajak. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka untuk menggalang pemasukan mengandalkan dari berbagai retribusi dan pajak. Dalam perkembangan dewasa ini, diantara sumber pemasukan dari sektor perpajakan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat menaruh harapan pada penerimaan dari

pajak-pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan. Hal itu cukup beralasan dan wajar apabila Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengandalkan penerimaan dari PBB, karena letak geografis dan kondisi daerahnya yang merupakan kawasan kabupaten berkembang, yang tidak mempunyai sumber daya alam, dan dalam perkembangan kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun pertumbuhan industri dan perdagangan berkembang pesat dan pembangunan berbagai bangunan fisik untuk mendukungnya juga berkembang sangat pesat.

Kondisi tersebut merupakan hal yang mendukung kemungkinan bertambahnya obyek dan jangkauan perkenaan pajak serta jumlah wajib pajak di Sukoharjo. Sehingga obyek kajian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya Bidang Pendapatan, dengan alasan bahwa lembaga tersebut Dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menangani dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengelolaan sumber pendapatan Kabupaten Sukoharjo, termasuk terhadap pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rang untuk menggali dan mengungkap serta mendiskripsikan mengenai kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dalam merealisasikan upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

Sedarmayanti (2011: 25) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi. Menurut Mangkunegara (2006 : 35) secara singkat dikemukakan bahwa prinsip dasar penelitian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Fokusnya adalah membina kekuatan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Jadi bukan semata-mata menyelesaikan persoalan itu sendiri, namun pimpinan dan karyawan mampu menyelesaikan persoalannya dengan baik setiap saat, setiap ada persoalan baru..
2. Selalu didasarkan atas pertemuan pendapat, misalnya hasil diskusi antar karyawan dengan penyedia langsung, suatu diskusi yang konstruktif untuk mencari jalan yang terbaik dalam meningkatkan mutu dan baku yang tinggi.

3. Suatu proses manajemen yang alami, jangan merasa dan menimbulkan kesan terpaksa, namun dimasukkan secara dasar, dilakukan secara periodic, terarah dan terprogram, bukan kegiatan yang setahun sekali atau kegiatan yang dilakukan jika manajer ingat saja.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo, (2004 : 78)

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengavaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Hak daerah atas pajak-pajak tersebut sudah diatur UU nomor 28 tahun 2009 Karena keberadaan hak dan kewenangan daerah atas pajak daerah tersebut sudah ada jauh sebelum otonomi daerah diberlakukan, maka setiap daerah tentunya sudah mengaturnya sejak lama, dan ketika pelaksanaan otonomi dewasa ini pada daerah tertentu mungkin hanya melakukan revisi untuk memperbaiki peraturan yang lama untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pajak sentral yang sangat berperan bagi penerimaan daerah, oleh karena itu selayaknya apabila hasil pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) diprioritaskan bagi daerah. Penarikan Pajak Bumi Bangunan di kabupaten Sukoharjo sudah di atur oleh Perda No 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **Metode Penelitian**

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2009: 67) penelitian kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai

di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terkait upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan.

### **Teknik Pengumpulan Data :**

Observasi (pengamatan). Arikunto, Suharsini (2006 : 123): "Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera". Observasi ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung kepada masyarakat atau wajib pajak serta kepada pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau data-data secara langsung melalui komunikasi timbal balik antara peneliti dengan responden. Proses yang dilakukan dengan wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang berdasarkan panduan wawancara. Pelaksanaan wawancara harus efektif, artinya wawancara dilakukan dalam waktu sesingkat- singkatnya dengan diperoleh data sebanyak- banyaknya.

Dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Arikunto, Suharsini (2006: 125), yaitu "Cara pengumpulan data dengan jalan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen majalah, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya".

### **Pembahasan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka kinerja yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi faktor penghambat diantaranya adalah dengan mengatasi masalah internal dan eksternal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo, pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dipaparkan telah banyak mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1). Menerbitkan kebijakan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/243/2014 tentang pemberian penghargaan kepada penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tingkat Kecamatan yang berkinerja baik. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada penanggungjawab penagihan tingkat kecamatan jika berhasil mencapai target penerimaan sebesar 85%. 2). Menerbitkan kebijakan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/244/2014 tentang pemberian penghargaan kepada penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tingkat Kelurahan yang berkinerja baik. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada penanggungjawab penagihan tingkat kelurahan jika berhasil mencapai target penerimaan sebesar 85%. 3). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo selalu berupaya untuk memutakhirkan data administrasi melalui penerapan sistem administrasi dan sistem informasi yang terintegrasi. 4). Memberdayakan tim Juru sita yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo yang disumpah oleh pejabat yang berwenang. 5). Mempublikasikan melalui media massa wajib pajak yang melanggar atau menunggak kewajiban pajaknya. 6). Menjalankan prosedur sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan. 7). Proses perekrutan SDM dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki agar tercipta profesionalisme kerja yang diharapkan. 8). Melakukan pelatihan secara reguler kepada semua pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.

Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sehingga penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Adapun beberapa temuan penting pada penelitian ini antara lain: 1). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan peran aktif Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo yang dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala dan kesulitan di lapangan. 2). Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam penerimaan PBB-P2 sangat baik. Berdasarkan pencapaian target yang telah ditentukan

dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian target penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014. 3). Meskipun berkinerja baik, namun dalam prakteknya tetap mengalami hambatan masalah. Masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam penerimaan PBB-P2 berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. 4). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo sebaiknya segera menangani dan menerapkan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam hal penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sukoharjo. Dikhawatirkan jika tidak segera ditangani akan berpengaruh pada penerimaan PBB-P2 pada masa yang akan datang. Mengingat besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 dalam pendapatan pajak daerah, yaitu sekitar 30%.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, analisa dan pembahasan pada bab IV sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam penerimaan PBB-P2 sangat baik. Berdasarkan pencapaian target yang telah ditentukan dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian target penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam penerimaan PBB-P2 berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: bidang kebijakan, sistem administrasi, konsistensi, dan sumberdaya manusia. Sedangkan faktor eksternal meliputi: sikap dan kesadaran wajib pajak, dan persesuaian data dengan realitas lapangan.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mangkunegara, 2006, *Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Negeri*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press Jakarta.
- Musaneff, 1991, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, LAN, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdyakarya, Bandung.

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan , 1992, Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/244/2014 tentang pemberian penghargaan kepada penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tingkat Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Dinas Kabupaten Sukoharjo.

Perda No 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.